

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Agus Takariawan. (2016). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Penerbit Pustaka

Reka Cipta.

Eko Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional,*

Regional dan Nasional. PT RajaGrafindo Persada.

Ishaq. (2017). *METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI,*

TESIS, SERTA DISERTASI (Cetakan Ke). Alfabeta.

Lamintang, P. A. F. (1990). *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana*

Melanggar Norma-norma Kesuilaan dan Norma-norma Kepatutan.

Mandar Maju.

Marpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesuilaan dan Masalah*

Prevensinya. Sinar Grafika.

Nasution, B. J. (2017). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (T. M. Maju

(ed.)). CV. Mandar Maju.

Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*

(Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan

Peradilan Administrasi Negara). Bina Ilmu.

R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Ratna Artha Windari. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Slamet, T. (2007). *Reparasi Terhadap Korban Pelanggar HAM di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Widodo. (2018). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain

(IJRS), I. J. R. S. (2021). *Kekerasan Seksual terhadap Laki-laki: Diabaikan*

dan Belum Ditanggani Serius. Indonesia Judicial Research Society.

[http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-](http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditanggani-serius/)

[ditanggani-serius/](#)

Aktaviani, L. N., & Puspitosari, H. (2022). Pelaksanaan Proses Penyidikan

Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif

Hukum Perlindungan Anak. *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL*

RISET ILMU HUKUM, 2(1), 11–21.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>. Info

Daring, K. (2016). *Cabul*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabul>

Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling : Candaan, Puji dan Pelecehan Seksual.

Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(2), 198–212.

<https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.02.p.04>

dpr.go.id. (2022). *UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan*

Turunan Segera Terbit. Dpr.Go.Id.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+Ketua+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit#:~:text=UU Nomor 12 Tahun 2022,sampai batas waktu dua tahun.>

Geger Riyanto. (2021). *Heboh Dugaan Pelecehan Seksual-Perundungan di*

KPI. DetikNews. [https://www.dw.com/id/heboh-dugaan-pelecehan-](https://www.dw.com/id/heboh-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-di-kpi/a-59069809)

[seksual-dan-perundungan-di-kpi/a-59069809](#)

Hakim Ghani. (2022). *Pria Garut yang Cabuli Dua Kakak Terancam 9 Tahun*

Bui. detikJabar. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6089305/pria-garut-yang-cabuli-dua-kakek-terancam-9-tahun-bui>

Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>

Lestari, L. E., & Arifin, R. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>

Maerani, I. A. (2015). Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Hukum*, 31(2), 1901–1932.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi* : 59, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

Muliono, A. J. (2021). *Kronologi Terlengkap Pelecehan Pegawai KPI, Mulai dari Melapor di Kepolisian sampai DM Instagram Hotman Paris*. ZonaBanten.com. <https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-232520916/kronologi-terlengkap-pelecehan-pegawai-kpi-mulai-dari-melapor-di-kepolisian-sampai-dm-instagram-hotman-paris?page=5>

- Munti, R. B. (2001). *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*. Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas-hol2472?page=all>
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, IV(1), 130–152.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, I(1), 13–28.
<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Pangesti, H. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Lex Crimen*, VIII(10), 56–64.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60–68.
- Surbakti, N. (2011). Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 90–106.

Tampi, B. M. (2015). Perbuatan Cabul Dalam Pasal 290 Kuhpidana Sebagai Kejahatan Kesusahaian. *Lex Administratum*, 3(6), 116–127.

Walukow, J. M. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, 1(1), 163–172. [https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320](https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320)